

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakikatnya pembangunan sebagai langkah perubahan yang dilakukan untuk mencapai keadaan yang lebih baik.¹ Pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses kompleks yang melibatkan transformasi beragam dari aspek sosial, perilaku masyarakat, dan lembaga negara, sambil memprioritaskan percepatan pertumbuhan ekonomi, mengatasi ketimpangan pendapatan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.² Pandangan pembangunan yang tengah berkembang saat ini merupakan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, yang dinilai berdasarkan pembangunan manusia yang mencerminkan tingkat kualitas hidup di setiap negara.³ Indikator yang dipakai untuk menilai kualitas manusia dapat berupa evaluasi terhadap mutu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Ketiga ukuran tersebut dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM digunakan sebagai alat untuk mengukur kemajuan ekonomi dengan menilai kualitas masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan kondisi ekonomi.⁴ Oleh karena itu, manusia menjadi kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan sumber daya manusia berarti sebagai peningkatan kemampuan dasar penduduk. Kemampuan dasar penduduk tersebut diperlukan untuk memperbesar kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dengan adanya peningkatan kemampuan dasar pula dapat dilihat dengan cara peningkatan kesehatan, pengetahuan dan keterampilan penduduk.⁵

¹ Alhumami and Amich, "Evolusi Pemikiran Pembangunan," BAPPENAS, 2005: 32.

² Machkel P Todaro and Stephen C Smith, *Pembangunan Ekonomi Edisi Ke-9* (Jakarta: Erlangga, 2011).

³ Muhammad Baihawafi and Asnita Frida Sebayang, "Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Terbuka," *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis (JRIEB)* 3, no. 1 (2023): 39–44, <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1911>.

⁴ Denni Sulistio Mirza, "Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap IPM Jawa Tengah Tahun 2006-2009," *JEJAK* 4, no. 2 (2011): 102–13, <https://doi.org/10.15294/jejak.v4i2.4645>.

⁵ Rivo Maulana, Agus Joko Pitoyo, and Muhammad Arif Fahrudin Alfana, "Analisis Pengaruh Kemiskinan Dan Kondisi Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017," *MKG* 23, no. 1 (2022): 12–24, <https://doi.org/10.23887/mkg.v23i1.39301>.

Peningkatan kemampuan dasar yang tinggi maka semakin tinggi pula IPM suatu wilayah. berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), aspek kesejahteraan dapat diukur melalui beberapa indikator. Misalnya, aspek kesejahteraan dalam bidang kesehatan dapat dilihat dari rata-rata harapan hidup, sedangkan aspek kesejahteraan dalam bidang pendidikan dapat diukur dari rata-rata lama sekolah dan tingkat melek huruf.⁶ Selain itu, kesejahteraan ekonomi dapat dilihat melalui pengeluaran perkapita. Menurut Fhino dan Priyo, indikator ekonomi, tingkat pendidikan, dan aspek kesehatan saling berkaitan dan tidak beroperasi secara independen. Meskipun mereka dapat dipengaruhi berbagai faktor lain seperti lapangan kerja yang tersedia, yang pada akhirnya dipengaruhi oleh banyak variabel terutama kebijakan pemerintah, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi.⁷

Pembangunan ekonomi dalam Islam tidak hanya membangun perekonomian rakyat saja melainkan sikap netral yang berarti membangun manusia secara utuh.⁸ Tidak hanya aspek fisik, kebutuhan spiritual juga sangat penting. Dalam konteks pembangunan Islam, hal ini dijelaskan sebagai suatu pendekatan yang mempelajari dan mengevaluasi proses pembangunan, faktor-faktor yang memengaruhinya, mengidentifikasi serta mengusulkan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW.⁹

Pendekatan ekonomi Islam dalam pembangunan sangat tergantung pada kemampuan SDM suatu negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan penduduknya.¹⁰ Al-Ghazali dan Huda berpendapat bahwa kesejahteraan manusia dipengaruhi oleh perlindungan terhadap keimanan (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aqal*),

⁶ Badan Pusat Statistik, "Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru," Badan Pusat Statistik, 2017.

⁷ Fhino Andrea Christy and Priyo Hari Adi, "Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal Dan Kualitas Pembangunan Manusia," *The 3rd National Conference UKWMS* 10, no. 3 (2009): 1–21, <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v12i1.348>.

⁸ Chapra, *Keuangan Publik Islami : Pendekatan Teoritis Dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2012): 63.

⁹ Irfan Syaqui Beik and Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016): 75.

¹⁰ Irfan Syaqui Beik and Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016): 75.

keturunan (*nashb*), dan kekayaan (*mal*).¹¹ Berikut Tabel 1.1 persentase IPM sepuluh Jawa Tahun 2020-2022.

Tabel 1.1. Persentase Indeks Pembangunan Manusia Sepuluh Jawa Tahun 2020-2022

Provinsi	Tahun		
	2020	2021	2022
DKI Jakarta	80,77	81,11	81,65
Jawa Barat	72,09	72,45	73,12
Jawa Tengah	71,87	72,16	72,79
DI Yogyakarta	79,97	80,22	80,64
Jawa Timur	71,71	72,14	72,75
Nasional	71,94	72,29	72,91

Sumber : BPS Nasional 2022

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa persentase IPM Jawa Tengah tahun 2022 termasuk 2 dari bawah di wilayah Pulau Jawa dan IPM Jawa Tengah berada dibawah IPM nasional. Meski begitu IPM Jawa Tengah terus mengalami kemajuan dengan ditandai dengan meningkatnya IPM Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, terdapat faktor yang mempengaruhi naiknya IPM di Jawa Tengah yaitu semakin meningkatnya jumlah dan kualitas pendidikan, perawatan kesehatan juga pembangunan ekonominya. Pada tahun 2022 terdapat peningkatan sebesar 0,63 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun IPM Jawa Tengah tergolong masih dibawah IPM Nasional yaitu 72,91% dibanding 72,79%, ini berarti pembangunan manusia di Jawa Tengah masih perlu adanya perbaikan yang lebih baik lagi. Berikut 4 Kabupaten/Kota yang memiliki IPM tertinggi di Jawa Tengah tahun 2022.

Tabel 1.2. 4 Kabupaten/Kota dengan IPM Tertinggi di Jawa Tengah Tahun 2022 (Persen)

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2020	2021	2022
Kota Salatiga	83,14	83,60	84,35
Kota Semarang	83,05	83,55	84,08
Kota Surakarta	82,21	82,62	83,08

¹¹ Chapra, *Keuangan Publik Islami : Pendekatan Teoritis Dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2012): 65.

Kota Magelang	78,99	79,43	80,39
---------------	-------	-------	-------

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Tabel 1.2 menunjukkan IPM tertinggi di Jawa Tengah tahun 2022 yaitu Kota Salatiga sebesar 84,35%, sedangkan yang terendah yaitu Kota Brebes sebesar 67,03%. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan pada setiap wilayah, baik dari segi infrastruktur, sumber daya manusia, ekonomi, dan kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, perbedaan tersebut menyebabkan adanya variasi dalam nilai IPM antara satu kabupaten/kota dengan yang lain.¹² Berdasarkan klasifikasi IPM yang telah ditetapkan oleh BPS terdapat empat kota (Kota Salatiga, Kota Surakarta, Kota Semarang, dan Kota Magelang) termasuk dalam kategori sangat tinggi, sementara 31 kota lainnya ada yang masuk kedalam kategori tinggi dan sedang.

Pertumbuhan ekonomi menjadi sasaran dalam pembangunan, maka pertumbuhan sering dikaitkan dengan IPM. Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu masyarakat, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia ketika lebih banyak barang dan jasa tersedia. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB) yang disesuaikan dengan harga konstan.¹³

Pertumbuhan ekonomi memiliki signifikansi yang besar karena ini mencerminkan peningkatan *output* per individu yang mencakup upah riil dan perbaikan dalam standar hidup. Peran pemerintah dalam pembangunan sebagai agen perubahan yang membantu masyarakat mencapai tujuan bersama melalui alokasi pengeluaran pemerintah dan anggaran belanja, termasuk pembangunan infrastruktur yang beragam dan strategis.¹⁴ Berikut persentase laju pertumbuhan ekonomi sepuluh Jawa tahun 2020-2022.

¹² Badan Pusat Statistik, “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah 2022,” *Berita Resmi Statistik*, 2022: 1-12.

¹³ Bappeda, “Produk Domestik Bruto” (Badan Pemerintah Daerah, 2013).

¹⁴ Purbayu Budi Santoso and Retno Puji Rahayu, “Analisis Pendapat Asli Daerah (PAD) Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri,” *Dinamika Pembangunan* 2, no. 1 (2005): 9–18.

Tabel 1.3. Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi Sepulau Jawa Tahun 2020-2022

Provinsi	Tahun		
	2020	2021	2022
DKI Jakarta	-2,39	3,56	5,25
Jawa Barat	-2,52	3,74	5,45
Jawa Tengah	-2,65	3,33	5,31
DI Yogyakarta	-2,67	5,58	5,15
Jawa Timur	-2,33	3,56	5,34
Nasional	-2,07	3,70	5,31

Sumber : BPS Nasional 2022

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi tiap Provinsi di Pulau Jawa mengalami perubahan yang fluktuatif. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama 3 tahun terakhir berada di paling bawah sepulau Jawa yakni 1,99 %, hal tersebut menunjukkan Jawa Tengah memiliki pertumbuhan ekonomi yang kurang baik dibanding Provinsi lain. Walaupun seperti itu, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 setara dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,31%. Hal tersebut menandakan bahwa Jawa Tengah dapat meningkatkan perekonomiannya, meski di tahun 2020 dilanda pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Selain pandemi Covid-19, fluktuasi yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi juga disebabkan dengan adanya kelahiran bayi dan migrasi.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang meningkat menandakan adanya penurunan jumlah pengangguran. Tingkat pengangguran memiliki dampak terhadap IPM, di mana tingkat pengangguran yang tinggi bisa menghasilkan ketidakstabilan ekonomi dan ketidakpastian dalam kehidupan masyarakat. Dampaknya bisa terlihat pada pendapatan per kapita dan ketersediaan akses terhadap sumber daya, seperti pendidikan dan kesehatan, yang pada gilirannya dapat menghambat kemajuan dalam parameter-parameter IPM dan mengakibatkan penurunan IPM di suatu daerah.¹⁵

¹⁵ BPS Provinsi Jawa Tengah, "Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Agustus 2020," *Beritas Resmi Statistik*, 2020: 1-14.

Tabel 1.4. Perbandingan Tingkat Pengangguran Sepulau Jawa Tahun 2020-2022 (Persen)

Provinsi	Tahun		
	2020	2021	2022
DKI Jakarta	5,15	8,51	8,00
Jawa Barat	7,71	8,92	8,35
Jawa Tengah	4,20	5,96	5,75
DI Yogyakarta	3,38	4,28	3,73
Jawa Timur	3,60	5,17	4,81
Nasional	4,94	6,26	5,83

Sumber : BPS Nasional 2022

Tabel 1.4 menunjukkan tingkat pengangguran Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 masih berada diperingkat ke-3 sepulau Jawa. Hal tersebut berarti tingkat pengangguran Provinsi Jawa Tengah tergolong tinggi jika dibandingkan dengan pengangguran Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur. Tingkat pengangguran Provinsi Jawa Tengah sejak 3 tahun terakhir mengalami perkembangan yang fluktuatif. Tingkat pengangguran Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,76 persen dan tingkat pengangguran nasional juga mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar 1,32 persen. Hal tersebut terjadi akibat adanya pandemi Covid-19 yang membuat terjadinya pemecatan massal dan penutupan lapangan pekerjaan akibat bangkrut. Sehingga IPM juga terdampak. Selain itu, pengangguran juga terjadi disebabkan adanya kenaikan partisipasi angkatan kerja setiap tahun dan tempat pekerjaan yang terbatas.

Pengangguran yang terjadi terus menerus akan menyebabkan terjadinya kemiskinan. Kemiskinan dapat menghambat pembangunan manusia yang berkelanjutan. Saat sebagian besar penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, kesempatan untuk mengakses nutrisi yang baik, pendidikan yang memadai, dan lingkungan yang mendukung kesehatan menjadi terbatas.¹⁶ Dari perspektif ekonomi, hal tersebut dapat mengakibatkan SDM yang kurang berkualitas. Dalam konteks

¹⁶ Tahan Upoyo Trisno, Munajat, and Yetty Oktarina, "Pengaruh Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020," *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 8 (2022): 3560–66, <https://journal/ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>.

ini, dapat berpengaruh terhadap tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah.¹⁷

Tabel 1. 5. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur Tahun 2020-2022

Tahun	Provinsi	
	Jawa Tengah	Jawa Timur
2020	11,41	11,09
2021	11,79	11,40
2022	10,93	10,38

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2023

Tabel 1.5 memaparkan persentase kemiskinan Provinsi Jawa Tengah lebih tinggi dibanding dengan persentase kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan dalam 3 tahun terakhir dengan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki nilai cukup tinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 11,79%. Hal tersebut terjadi akibat dari adanya pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat kehilangan pekerjaannya, banyaknya usaha yang mengalami gulung tikar, dan akses pendidikan terbatas yang pada akhirnya menghambat produktivitas masyarakat. Melihat data tersebut, masih diperlukan adanya upaya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Oleh karena itu, upaya pemerintah dan organisasi internasional diperlukan untuk mengatasi konsekuensi sosial dan ekonomi yang dihasilkan.

Data pertumbuhan ekonomi diambil melalui BPS Provinsi Jawa Tengah dimana Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah atas harga konstan 2010 Lapangan Usaha 2017-2022 mengalami fluktuasi yang terjadi pada tahun 2020 yang mencapai -2,65%. Pada tahun sebelumnya 2019 sebesar 5,36% dan di tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 3,33%. Data Pengangguran Provinsi Jawa Tengah berdasarkan BPS, pengangguran mengalami fluktuasi dari tahun 2020 4,2%, di tahun 2021 meningkat menjadi 5,96% serta penurunan di tahun 2022 menjadi 5,75%. Data Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan BPS, Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi. Dimana tahun 2018 kemiskinan Jawa Tengah sebesar 11,32% dan ditahun berikutnya

¹⁷ Mardika Febrianto and Astrid Maria Esther, “Pengaruh Anggaran Pendidikan, Anggaran Kesehatan, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Trisakti* 3, no. 2 (2023): 2841–50, <http://dx.doi.org/10.25105/jet.v3i2.17787>.

turun menjadi 10,8%. Kenaikan tingkat kemiskinan terjadi pada tahun 2020 sebesar 11,41 dan 2021 sebesar 11,79. Meski pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi, namun IPM Provinsi Jawa Tengah tetap mengalami kenaikan.

Abie dan Dewi dalam penelitiannya tahun 2023 menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.¹⁸ Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lora, dkk dalam penelitiannya tahun 2021 menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.¹⁹ Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Andri dan Ali tahun 2022 menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.²⁰ Penelitian Anggi tahun 2023 menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.²¹ Penelitian yang dilakukan oleh Munajat, dkk tahun 2022 menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia.²² Namun berbeda dengan penelitian dari Rivo tahun 2022 menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.²³

Keterbaruan penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu yaitu adanya ketidakkonsistenan hasil pada penelitian sebelumnya dan peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan terhadap

¹⁸ Abie Rachman Muhamad and Dewi Rahmi, "Pengaruh Teknologi, Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintha, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jabar," *Jurnal Rizet Ilmu Ekonomi Dan Bisnis (JRIB)* 3, no. 1 (2023): 45–52, <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3il.1924>.

¹⁹ Lora Ekana Nainggolan, Lenny Dermawan Sembiring, and Nana Triapnita Nainggolan, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Yang Berdampak Pada Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Binawakya* 15, no. 10 (2021): 5457–74, <http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>.

²⁰ Andri Irawan and Ali Akbar, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020," *KLASSEN* 2, no. 1 (2022): 17–31.

²¹ Anggi Ayunara, "Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2018-2022" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

²² Trisno, Munajat, and Oktarina, "Pengaruh Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020."

²³ Maulana, Pitoyo, and Alfana, "Analisis Pengaruh Kemiskinan Dan Kondisi Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017."

IPM di Jawa Tengah tahun 2017-2022. Berdasarkan kondisi yang seperti itu, maka penulis ingin untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Indeks Pembangunan Manusia Ditinjau dari Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Jawa Tengah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang terkait dengan latar belakang masalah:

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah pada tahun 2017-2022?
2. Apakah Pengangguran berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah pada tahun 2017-2022?
3. Apakah Kemiskinan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah pada tahun 2017-2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah pada tahun 2017-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah paada Tahun 2017-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah pada tahun 2017-2022.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain:

- a. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi penulis hasil penlitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulisan tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2017-2022.
 - 2) Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tengah : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi faktual yang berkaitan dengan pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2017-2022.

b. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai informasi bagi mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus, khususnya mahasiswa/i Jurusan Ekonomi Syari'ah yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.
- 2) Akademisi: Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca dan sebagai salah satu referensi bagi kepentingan keilmuan yang berkaitan dengan pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2017-2022.

E. Sistematika Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam BAB I berisi atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Dalam BAB II berisi sumber informasi yang berasal dari penelitian terdahulu dalam kajian pustaka yang mana topiknya sama dengan penelitian yang sedang dibahas, kemudian terdapat landasan teori berisikan penjelasan tentang teori yang akan digunakan peneliti, menjelaskan hubungan antar variabel dalam permasalahan penelitian, membuat kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam BAB III berisi jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, penjelasan mengenai variabel penelitian, definisi operasional variabel dan metode yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB IV berisi mengenai informasi terkait data yang digunakan dalam penelitian dan memaparkan hasilnya secara parsial (keseluruhan) beserta hasil analisis data yang diteliti oleh penulis.

BAB V : KESIMPULAN DAN HASIL

Dalam BAB V berisi mengenai informasi dari kesimpulan yang didapat dari hasil dan pembahasan, saran dari permasalahan dalam penelitian yang telah dilakukan peneliti.

